



SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

PEDOMAN SMK MEMBANGUN DESA

DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan
- D. Sasaran
- E. Manfaat

BAB II KONSEP SMK MEMBANGUN DESA

- A. Definisi
- B. Prinsip
- C. Ruang lingkup

BAB III PROSEDUR SMK MEMBANGUN DESA

- A. Pemetaan Potensi
- B. Pemetaan Ekosistem
- C. Perencanaan Program
- D. Kolaborasi

BAB IV STRATEGI IMPLEMENTASI SMK MEMBANGUN DESA

- A. Pembelajaran
- B. Kewirausahaan
- C. Inovasi Teknologi Tepat Guna
- D. Pemberdayaan Masyarakat

BAB V PENGUKURAN KINERJA SMK MEMBANGUN DESA

BAB VI PENUTUP

PENGANTAR

Berkaitan dengan program pemerintah tentang pembangunan ekonomi pedesaan, sejak tahun 2018 telah dimulai dengan pengalokasian dana stimulus melalui kementerian dan lembaga terkait, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan yang direalisasikan dalam bentuk program-program pengembangan atau peningkatan pembangunan dalam berbagai aspek di pedesaan.

Untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah tersebut, Direktorat SMK berinisiasi mendorong Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tersebar diseluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program-program desa tersebut, dalam pelaksanaannya dilakukan secara kolaboratif dengan Pemerintah Desa dan atau kementerian/kelembagaan lain, dalam peningkatan daya saing sumber daya manusia pedesaan melalui pendidikan dan pelatihan, pengintegrasian pembelajaran praktik, *teaching factory*, PKL, serta pemanfaatan kapasitas lain yang dimiliki SMK.

Kolaborasi program SMK dengan Desa dapat dilakukan sesuai dengan program keahlian yang dimiliki SMK, maupun program keahlian yang lainnya namun demikian tetap memerhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan tuntutan kurikulum yang telah diselaraskan dengan dunia usaha dan industri.

Sebagai upaya agar ada keseragaman, landasan, dan acuan SMK dalam berperan, memposisikan diri, berkolaborasi dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan secara efektif dan efisien, maka diperlukan pedoman yang disebut Pedoman SMK Membangun Desa.

Pedoman SMK Membangun Desa ini diharapkan menjadi acuan semua SMK serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembanguna ekonomi di pedesaan, dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.



Jakarta, Februari 2021
Direktur SMK,

Dr. Ir. M. Bakrun, M.M.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak pemerintah mengalokasikan dana stimulan untuk pengembangan ekonomi pedesaan melalui dana desa di Kementerian dan Lembaga terkait, banyak program-program yang dikemas dan disalurkan ke pemerintah desa yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan keterlibatan berbagai pihak termasuk institusi pendidikan seperti SMK agar hasilnya dapat maksimal.

Keberadaan SMK dengan sistem pembelajaran, termasuk PKL, dalam peningkatan kompetensi peserta didik dilakukan dengan praktik langsung di lapangan kerja, sedangkan tenaga pendidik, khususnya guru kejuruan, sudah kompeten dalam bidangnya, selain mengajar juga melakukan pekerjaan yang telah biasa dilakukan melalui pusat bisnis, unit produksinya atau Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Sejumlah SMK mempunyai aset atau fasilitas yang bisa dimanfaatkan masyarakat khususnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan lainnya.

SMK memiliki 9 (sembilan) bidang keahlian, yang lulusannya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, dengan kompetensi yang berbeda-beda dapat mendukung program pembangunan ekonomi pedesaan, karena tujuan utama lulusan SMK dipersiapkan untuk mengisi dunia kerja pada tingkat global, nasional, dan regional, serta kemandirian sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Pembangunan perdesaan bagian integral dari pembangunan nasional dan memenuhi kebutuhan tenaga standar internasional, sehingga peran SMK dalam pembangunan perdesaan selain berdasarkan landasan keunggulan dan kearifan lokal, juga tidak bisa dilepaskan dari kaidah-kaidah dan teknologi global. Produk-

produk perdesaan harus memiliki standar internasional, sehingga proses produksi yang dilakukan di perdesaan juga harus memenuhi standar global. Di sinilah salah satu peran SMK dalam pembangunan perdesaan, untuk turut serta melakukan percepatan perubahan pola pikir, penerapan teknologi modern dan tepat guna, dan prosedur kerja warga perdesaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78, Ayat (1) menyatakan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa sebagai basis kekuatan pembangunan masih mengalami permasalahan mendasar, mengingat jumlah maupun persentase kemiskinan masih di dominasi penduduk perdesaan. Walaupun pembangunan infrastruktur dan dana desa semakin besar, namun program tersebut belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat desa menjadi lebih sejahtera. Arus uang yang mengalir ke desa dari program dana desa belum sepenuhnya dinikmati penduduk miskin. Kebijakan Dana Desa untuk pembangunan yang berorientasi pembangunan infrastruktur belum bisa mengangkat penduduk miskin keluar dari jebakan kemiskinan yang kronis.

Peran SMK dalam pembangunan perdesaan menjadi penting untuk saat ini maupun di masa depan, mengingat sebagian besar SMK berada di kawasan perdesaan. SMK dapat berperan menjadi penggerak pembangunan perdesaan, dengan melakukan inovasi dan edukasi masyarakat desa menjadi masyarakat modern dan berkembang. Selain itu, lulusan SMK dapat menjadi angkatan

kerja baru perdesaan yang menguasai kecakapan teknologi modern dan tepat guna, keterampilan kreativitas dan inovasi, pemikiran kritis dan pemecahan masalah kompleks, komunikasi, kolaborasi, dan kewirausahaan, sehingga lulusan SMK akan menjadi generasi baru perdesaan dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. an Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

C. Tujuan

Memberikan acuan kepada SMK dan pihak terkait lainnya dalam berpartisipasi mendukung program pembangunan sumber daya manusia di pedesaan dan ekonomi pedesaan secara kolaboratif, termasuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta hal lain yang terkait dengan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan yang dikolaborasikan.

D. Sasaran

Sasaran dari Program SMK Membangun Desa adalah SMK yang berada di seluruh wilayah Indonesia.

E. Manfaat

1. SMK, desa/kelurahan, dan pihak terkait lainnya memiliki persepsi yang sama tentang konsep SMK membangun desa;
2. SMK memiliki acuan dalam melakukan program, sinergi, prosedur, strategi, monitoring dan evaluasi program SMK membangun desa;
3. Desa/kelurahan memiliki acuan dalam melaksanakan sinergi dengan SMK untuk memajukan sekolah dan pembangunan perdesaan;
4. Mitra (*Stakeholder*) lainnya memiliki acuan dalam mendukung penguatan peran SMK dalam pembangunan perdesaan.

BAB II

KONSEP SMK MEMBANGUN DESA

Konsep SMK Membangun Desa meliputi definisi, prinsip, dan ruang lingkup.

A. Definisi

SMK membangun desa adalah penguatan peran SMK dalam pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi pedesaan dengan berkolaborasi antara Pemerintah Desa dengan pihak terkait lainnya melalui:

- 1. pengintegrasian** pembelajaran praktik, TeFa (*Teaching Factory*), dan PKL (Praktik Kerja Lapangan) ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di pedesaan yang sesuai dan berkaitan dengan kompetensi keahliannya;
- 2. inovasi** teknologi tepat guna untuk percepatan pembangunan pedesaan;
- 3. pelibatan** warga sekolah karena kahliannya, dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di pedesaan;
- 4. pemanfaatan aset dan program** sekolah, desa, dan lembaga terkait dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan melalui pendidikan dan pelatihan, dan atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan lain terkait pelaksanaan kegiatan- kegiatan pembangunan di pedesaan.

B. Prinsip

SMK membangun desa berbasis kolaborasi bersama Pemerintah Desa dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 1. Saling menguntungkan (*mutual benefit*).** Saling menguntungkan disini bukan hanya materi tetapi juga non

materi, yaitu dilihat dari kebersamaan atau sinergitas dalam mencapai tujuan secara bersama;

2. **Berorientasi hasil.** Kerja sama yang efektif harus didasari pada realitas dan berorientasi pada tindakan. Hal ini membutuhkan koordinasi yang berorientasi hasil dan berbasis pada kemampuan efektif dan kapasitas operasional yang konkrit;
3. **Keterbukaan (transparansi).** Kelebihan dan kekurangan, program-program yang dikembangkan dan berkesesuaian, serta potensi-potensi yang dimiliki harus diketahui oleh kedua belah pihak. Transparansi dicapai melalui dialog (pada tingkat yang setara) dengan menekankan konsultasi dan pembagian informasi terlebih dahulu. Komunikasi dan transparansi, termasuk transparansi finansial, sehingga membantu peningkatan kepercayaan kedua belah pihak;
4. **Kesetaraan.** Masing-masing pihak yang bermitra harus merasa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, tidak boleh satu pihak memaksakan kehendak kepada pihak lain. Kesetaraan membutuhkan rasa saling menghormati antar para pihak yang bermitra tanpa melihat besaran dan kekuatan. Para pihak harus saling menghormati mandat kewajiban dan kemandirian dari pihak lainnya, serta memahami keterbatasan dan komitmen yang dimiliki satu sama lain. Sikap saling menghormati tidak menghalangi masing-masing pihak untuk terlibat dalam pertukaran pendapat yang konstruktif;
5. **Tanggung Jawab.** Para pihak memiliki tanggung jawab etis terhadap satu sama lain dalam menempuh tugas-tugasnya secara bertanggung jawab, dengan integritas dan cara yang relevan dan tepat. Para pihak harus meyakinkan bahwa mereka hanya akan berkomitmen terhadap sesuatu kegiatan ketika

mereka memang memiliki alat, kompetensi, keahlian dan kapasitas untuk mewujudkan komitmen tersebut;

6. **Saling Melengkapi.** Kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki para pihak dapat dijadikan modal dasar untuk saling melengkapi kontribusi yang satu dengan yang lainnya. Saling melengkapi akan menumbuhkan kekuatan baru dalam mencapai tujuan bersama.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SMK membangun desa meliputi 4 (empat) cakupan, yaitu sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaan program-program pembangunan pedesaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi melalui pemanfaatan unsur sekolah termasuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan aset;
2. Dalam peningkatan kualitas kebecerjaan dan kewirausahaan sumber daya masyarakat pedesaan melalui pendidikan dan pelatihan;
3. Dalam eksplorasi dan peningkatan produksi keunggulan daerah melalui pengenalan teknologi tepat guna.
4. Dalam layanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Ruang lingkup SMK Membangun Desa untuk mendukung terwujudnya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. SDGs merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs Desa mencakup 18 rencana aksi, yaitu: (1) desa tanpa kemiskinan; (2) desa tanpa kelaparan; (3) desa sehat dan sejahtera; (4) pendidikan desa berkualitas; (5) keterlibatan perempuan desa; (6) desa layak air bersih dan sanitasi; (7) desa berenergi bersih dan

terbarukan; (8) pertumbuhan ekonomi desa merata; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) desa tanpa kesenjangan; (11) kawasan pemukiman desa aman dan nyaman; (12) konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; (13) desa tanggap perubahan iklim; (14) desa peduli lingkungan laut; (15) desa peduli lingkungan darat; (16) desa damai berkeadilan; (17) kemitraan untuk pembangunan desa; dan (18) kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.



Gambar 2. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa

BAB III

POSEDUR SMK MEMBANGUN DESA

Platform SMK Membangun Desa adalah kolaborasi bersama dengan Pemerintah Desa. Prosedur atau langkah yang harus dilakukan oleh SMK dalam meningkatkan peranannya dalam pembangunan pedesaan, dapat dilakukan sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 2. Prosedur SMK Membangun Desa

A. Pemetaan Potensi

Pemetaan potensi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki SMK, Desa/Kelurahan, lembaga terkait, dan DUDI, yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah dalam penguatan peran SMK dalam pembangunan pedesaan. Pemetaan potensi dimulai dengan evaluasi diri (potret sekolah), yaitu meliputi: (1) pemetaan sumber daya manusia yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan; (2) kurikulum/pembelajaran; (3) sarana prasarana; dan (4) tata kelola sekolah, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang mendukung terhadap program ini.

Pemetaan potensi desa/kelurahan bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari desa/kelurahan, meliputi sumber daya manusia desa/kelurahan, sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya pendukung, seperti peraturan-peraturan tentang pemerintahan desa/kelurahan.

Pemetaan potensi lembaga-lembaga yang memiliki program pembangunan pedesaan seperti antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan. Program-program dari dinas-dinas tersebut dapat disinergikan dengan program sekolah dalam pembangunan pedesaan.

Pemetaan potensi DUDI dengan melakukan identifikasi terhadap jenis, produk, tren pasar sebagai daya dukung yang dapat dimanfaatkan sekolah dalam sinergi program pembangunan pedesaan. DUDI tidak saja industri besar, termasuk juga usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang banyak tersebar di pedesaan.

B. Pemetaan Ekosistem/Pola Terintegrasi

Pemetaan ekosistem/pola terintegrasi menjadi penting bagi sekolah, mengingat potensi desa pada umumnya berkisar antara lain meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, budaya, sedangkan Bidang Keahlian yang dikembangkan di SMK meliputi 9 (sembilan) bidang keahlian, yaitu: (1) Teknologi dan Rekayasa; (2) Energi dan Pertambangan; (3) Teknologi Informasi dan Komunikasi; (4) Kesehatan dan Pekerjaan Sosial; (5) Agribisnis dan Agroteknologi; (6) Kemaritiman; (7) Bisnis dan Manajemen; (8) Pariwisata; dan (9) Seni dan Industri Kreatif.

Potensi desa dan bidang keahlian yang ada di SMK sepiantas tidak selaras, namun apabila dilakukan pemetaan ekosistem, maka akan nampak bahwa satu potensi desa berkaitan dengan kompetensi keahlian lainnya yang dibutuhkan. Misalnya, pertanian membutuhkan teknologi tepat guna untuk mengolah lahan, proses produksi, pengolahan produk, pemasaran produk, distribusi produk, administrasi pengelolaan pertanian, kuliner, seni budaya, kesehatan masyarakat, bahkan saat ini banyak pertanian yang dikembangkan menjadi wisata, sehingga ekosistem yang terjadi akan semakin luas, meliputi penginapan, transportasi antara kota, advertising, bisnis daring.

Keterkaitan satu kompetensi dengan kompetensi lainnya tidak dapat dihindarkan, karena dalam dunia kerja tidak ada yang dapat berdiri sendiri, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini



Gambar 3. Contoh Ekosistem Pariwisata

C. Perencanaan Program

Berdasarkan hasil pemetaan potensi dan ekosistem pembangunan perdesaan, selanjutnya disusun perencanaan program. Perencanaan program SMK Membangun Desa tidak dapat dilepaskan dari rencana strategis (renstra) sekolah/rencana induk pengembangan sekolah (RIPS)/Peta Jalan Sekolah, sehingga tidak diperlukan lagi program secara khusus yang terpisah dari Renstra/RIPS/Peta Jalan Sekolah.

Pengelolaan SMK menggunakan pendekatan manajemen berbasis sekolah/masyarakat (MBS/M) yang mendorong penyelenggaraan sekolah dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan memerhatikan kebijakan nasional dan karakteristik SMK. Penerapan MBS/M mendorong kemandirian SMK dalam pengelolaan pendidikan agar sesuai dengan potensi lingkungan budaya, kearifan lokal, dukungan partisipasi masyarakat dan sumber-sumber pembelajaran yang tersedia berdasarkan keunggulan dan ciri khas SMK.

Dalam penerapan MBS/M berkaitan dengan SMK membangun desa. Sekolah dapat merancang strategi untuk mencapai tujuan penguatan peran SMK dalam pembangunan pedesaan, melalui peningkatan kolaborasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, atas prakarsa bersama dalam membuat keputusan dan penerapannya.

Program SMK membangun desa disusun bersama antara sekolah dan desa, serta unsur-unsur terkait. Perencanaan dituangkan dalam perencanaan jangka menengah dan pendek atau tahunan, dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang dimiliki sekolah, desa/kelurahan, DUDI dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

D. Kolaborasi

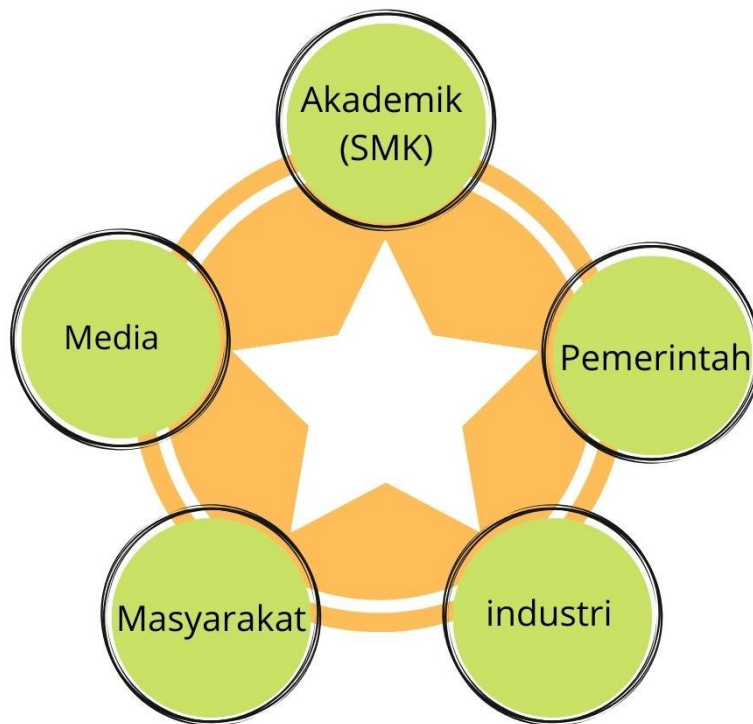
Berdasarkan hasil pemetaan potensi dan pemetaan ekosistem yang dituangkan dalam perencanaan program penguatan peran SMK dalam pembangunan pedesaan, selanjutnya sekolah melakukan kolaborasi/kemitraan dengan desa/kelurahan dan atau DUDI dan lembaga terkait lainnya.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam pengelolaan organisasi atau bisnis di masa kini. Organisasi masa lampau seluruh aset harus dimiliki sendiri, seperti gedung, lahan, fasilitas, tenaga pengajar, sehingga modal awal dan operasional menjadi mahal karena membutuhkan biaya yang besar. Organisasi masa kini, sudah waktunya melakukan kolaborasi, saling berbagi, dan tidak harus memiliki sendiri semua aset untuk mengelola sebuah sekolah. SMK dapat saling memanfaatkan sumber daya dengan desa/kelurahan, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta.

Kolaborasi perlu dibangun secara holistik mengikut sertakan pemangku kepentingan yang mempunyai daya dukung

keberhasilan yang tinggi. Prosedur atau langkah-langkah yang dapat dilakukan SMK dalam menjalin kerja sama dimulai dengan pendekatan atau penjangjangan terhadap desa/kelurahan. Setelah terjalin saling pengertian yang baik, selanjutnya dilakukan ikatan kerja sama secara formal untuk memperkuat jalinan kerja sama tersebut.

Salah satu model kerja sama yang sering dilakukan dalam pembangunan pedesaan dengan model *pentahelix*. Model *pentahelix* adalah suatu desain integrasi dari lima unsur, yaitu unsur pemerintah, industri, akademisi, masyarakat desa/kelurahan, dan media. Tetapi bagi SMK yang belum mampu menerapkan model *pentahelix* dapat menggunakan model kerja sama lainnya, seperti model *triple helix* (akademik, pemerintah, bisnis).



Gambar 4. Kerja Sama Model *Pentahelix*

Setiap unsur memiliki peranannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Peran Masing-masing Unsur dalam Model *Pentahelix*

Unsur	Peran
Pemerintah	Pengaturan, Pembinaan, Fasilitas, dan Pengawasan
Industri/swasta	• Sumber modal usaha • Membuka lapangan pekerjaan • Perekrutan SDM lokal sebagai pelaku industri
Akademisi	• Pelaksana pelatihan dan pengembangan SDM • Pelaksana pemetaan ilmiah • Pelaksana sosialisasi dan pendampingan kelompok masyarakat
Masyarakat	• Berperan sebagai pelaku usaha yang bergerak langsung/tidak langsung di industri • Memonitor dampak industri terhadap budaya dan sosial masyarakat
Media	Instrumen promosi, distribusi informasi dan perbaikan citra

Pengelolaan sekolah dengan model *pentahelix* dapat menjadi model dalam penguatan peran SMK dalam pembangunan perdesaan ke depan untuk peningkatan sinergi, efesiensi dalam pengelolaan sekolah melalui *sharing* aset, percepatan kemandirian sekolah, serta mewujudkan desa/kelurahan yang mandiri dan sejahtera.

Pemerintah pusat melalui beberapa kementerian telah meluncurkan berbagai program untuk pembangunan pedesaan, sebagaimana program-program yang luncurkan oleh BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas KKP, Dinas

Perhubungan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, sehingga sekolah perlu melakukan pendataan program-program tersebut untuk memperkuat perencanaan dan implementasi program kerja sama SMK dengan Desa dan menghindari terjadinya tumpang tindih program pembangunan pedesaan.

BAB IV

STRATEGI IMPLEMENTASI SMK MEMBANGUN DESA

Penguatan peran SMK dalam pembangunan perdesaan dapat dilakukan dengan berbagai strategi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, antara lain melalui pembelajaran, kewirausahaan, inovasi teknologi tepat guna, dan pemberdayaan masyarakat. Sekolah dapat melakukan semua strategi atau memilih strategi mana yang sesuai dengan kondisi sekolah.



Gambar 5. Strategi Implementasi SMK Membangun Desa

A. Pembelajaran

Pembelajaran pada era revolusi industri 4.0 lebih fleksibel dengan memanfaatkan ragam sumber belajar, peserta didik bisa berinteraksi dengan banyak narasumber selain guru, belajar lebih individual/personal sesuai dengan minat bakat, dan belajar dapat dilakukan dimana saja.

Kolaborasi program antara SMK dengan Pemerintah Desa melalui pembelajaran dilakukan sebagai berikut.

1. Proses Pembelajaran sesuai peraturan yang berlaku, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran;
2. Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk RPP dan atau perangkat pembelajaran lain yang mengacu kepada silabus dan kurikulum yang telah diselaraskan dengan dunia usaha dan industri;
3. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui pembelajaran praktik, pembelajaran sistem blok, *teaching factory*, praktik kerja lapangan (PKL), dan Pendidikan Sistem Ganda (PSG);
4. Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan mengikuti ketentuan pedoman penilaian serta memperhatikan karakteristik mata pelajaran;
5. Pelaksanaan pembelajaran antara lain dapat menggunakan model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*), Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*), dan Pembelajaran Industri (*Teaching Factory*) atau Laboratorium Edukasi Tani (LARETA);
6. Sertifikasi kompetensi dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan ketercapaian sertifikat kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level II atau III.
7. Praktik Kerja Lapangan (PKL). Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan sertifikasi PKL di pedesaan tetap mengacu peraturan dan pedoman yang telah diterbitkan oleh Direktorat SMK. Program PKL di pedesaan dirancang untuk membekali lulusan SMK agar siap memasuki dunia kerja serta dapat mengembangkan sikap dan kemampuan profesional keahliannya melalui pembelajaran langsung pada pekerjaan

yang sesungguhnya di wilayah pedesaan. PKL di pedesaan, antara lain dapat dilakukan di kantor desa, UMKM, atau di masyarakat. Adapun Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam kegiatan PKL di desa/kelurahan dilakukan sebagaimana PKL di DUDI pada umumnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian dan sertifikasi

B. Kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan dalam penguatan peran SMK dalam pembangunan perdesaan diperuntukan bagi peserta didik, lulusan SMK, dan warga masyarakat. Tujuan pelatihan kewirausahaan bagi peserta didik dan lulusan adalah menyiapkan mereka untuk menjadi pengusaha pemula (*start up*), sedangkan kewirausahaan bagi warga desa, selain untuk menyiapkan mereka menjadi pengusaha pemula, dapat juga untuk peningkatan kualitas usaha yang telah berkembang di masyarakat. Pengembangan kewirausahaan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan oleh guru atau praktisi, dan dapat juga dilakukan oleh guru yang bekerja sama dengan praktisi.

Penguatan kewirausahaan bagi peserta didik dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Dasar kewirausahaan melalui mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, yang dilakukan secara kelompok atau individual di sekolah melalui bimbingan guru dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa mitra;
2. Kewirausahaan melalui belajar secara praktis di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau masyarakat yang ada di pedesaan, dilakukan secara kelompok atau individu melalui bimbingan praktisi;

3. Kemandirian berwirausaha dengan mendirikan usaha mandiri sesuai dengan kompetensi keahlian melalui berkolaborasi dengan pihak-pihak lain.

Peserta didik dalam melakukan kewirausahaan di masyarakat berperan serta dalam membangkitkan UMKM dan masyarakat melalui antara lain penerapan teknologi 4.0 dalam proses produksi, pemasaran daring, penguatan tata kelola usaha secara modern, sehingga memberikan nilai tambah (*added value*) terhadap produk dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kewirausahaan bagi lulusan dan warga masyarakat ditujukan pada lulusan atau warga masyarakat yang belum bekerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau yang ingin meningkatkan usahanya. Pembekalan dan penguatan kewirausahaan bagi lulusan dan warga masyarakat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pemasaran produk.

SMK dalam pengelolaan hasil pembelajaran guna pembangunan masyarakat desa, pemanfaatan aset sekolah untuk kepentingan masyarakat, pemasaran produk desa dan sekolah, dapat dikelola melalui BLUD SMK. Diharapkan melalui pengelolaan BLUD, SMK tidak hanya meningkatkan mutu sekolah tetapi juga dapat berperan dalam meningkatkan pembangunan desa.

C. Inovasi Teknologi Tepat Guna

Sesuai dengan fungsi dan tugas akademisi (SMK) dalam kolaborasi model *pentahelix* adalah sebagai inovator dalam percepatan pembangunan di pedesaan. Sekolah dituntut berperan aktif dalam melakukan modernisasi teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar.

Inovasi teknologi tepat guna berdasarkan kepada permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat pedesaan, tujuannya adalah untuk mempercepat pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat, memperluas lapangan kerja, lapangan usaha, peningkatan produktivitas, dan mutu produksi. Dalam inovasi teknologi tepat guna perlu diperkenalkan teknologi industri 4.0 yang berbasis digital, selain merupakan tuntutan yang tidak dapat lagi terelakan dalam pembangunan saat ini, juga akan mendorong minat generasi muda untuk berperan aktif pada pembangunan di pedesaan.

Inovasi teknologi tepat guna dapat dilakukan oleh peserta didik secara kelompok atau dilakukan oleh guru bekerjasama dengan peserta didik atau dilakukan oleh guru. Apabila diperlukan, sekolah dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi atau para ahli. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam inovasi teknologi tepat guna dapat dilakukan sebagai berikut;

1. Identifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam melakukan proses produksi dan menetapkan solusi yang akan dilakukan;
2. Melakukan studi pendahuluan dengan kajian literatur dari berbagai media, baik itu media cetak maupun elektronik, serta melakukan survey awal untuk memperjelas permasalahan dalam inovasi teknologi tepat guna;
3. Membuat desain awal dan memilih desain terbaik, membuat jadwal produksi, menyiapkan sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang diperlukan dalam inovasi teknologi tepat guna;
4. Mengembangkan produk awal;
5. Melakukan uji coba teknologi tepat guna secara terbatas, misalnya di lingkungan sekolah;

6. Melakukan perbaikan terhadap teknologi tepat guna, berdasarkan hasil uji coba terbatas (apabila diperlukan);
7. Melakukan uji coba lebih luas, yaitu langsung di lingkungan desa mitra;
8. Melakukan perbaikan terhadap teknologi tepat guna, berdasarkan hasil uji coba lebih luas (apabila diperlukan);
9. Penyebaran dan pemanfaatan hasil inovasi teknologi tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan. Teknologi tepat guna yang memiliki nilai kebaruan dan ekonomis dapat didaftarkan hak atas kekayaan intelektual (HaKI).

Inovasi teknologi tepat guna dapat dilakukan untuk kepentingan berbagai bidang, seperti untuk kebutuhan pengembangan kuliner, fesyen, pertanian, seni, pariwisata.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pemberdayaan masyarakat adalah optimalisasi peran SMK terhadap pembangunan masyarakat dan sebaliknya optimalisasi peran masyarakat terhadap pengembangan pendidikan. Pemberdayaan masyarakat dalam SMK Membangun Desa lebih dititik beratkan pada peran sekolah dalam pembangunan masyarakat.

Bentuk pemberdayaan masyarakat desa dapat berupa antara lain: pemanfaatan aset masyarakat dan lembaga terkait untuk peningkatan kualitas pendidikan, pemanfaatan aset sekolah untuk kegiatan masyarakat, pengelolaan limbah rumah tangga,

pemberantasan limbah rumah tangga, pemberdayaan masyarakat desa berbasis internet, sosialisasi bahaya narkoba, pemberian bibit tanaman untuk masyarakat, pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana.

BAB V

PENGUKURAN KINERJA PROGRAM SMK MEMBANGUN DESA

Pengukuran kinerja program penguatan peran SMK dalam pembangunan perdesaan, bertujuan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien program SMK Membangun Desa terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa/kelurahan sebelum (*before*) dan setelah (*after*) program dilaksanakan. Pengukuran kinerja ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti *input*, proses, *output*, *outcome*, dan *impact*.

Input (masukan), pengukuran input (masukan) membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen pengukuran kinerja masukan meliputi: (1) sumber daya manusia; (2) sarana prasarana pendukung; (3) dana/anggaran; dan (4) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

Process (Proses), pengukuran proses untuk mengetahui sejauh mana perencanaan dilakukan secara efektif dan efisien. Pengukuran proses meliputi: (1) efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran; (2) efektivitas dan efisiensi proses pelatihan kewirausahaan; (3) efektivitas dan efisiensi proses inovasi teknologi tepat guna; dan (4) efektivitas dan efisiensi proses pemberdayaan masyarakat.

Output (Hasil), pengukuran *output* adalah pengukuran terhadap produk/hasil dari suatu program atau kegiatan, misalnya antara lain: (1) kualitas lulusan sesuai SKL dan kebutuhan DUDI;

(2) sertifikat kompetensi bagi lulusan sesuai KKN level II dan III, serta sertifikasi kompetensi bagi warga masyarakat; (3) meningkatnya jumlah peserta didik, lulusan, dan warga desa yang berwirausaha; (3) meningkatnya inovasi teknologi tepat guna; dan (4) meningkatnya kuantitas dan kualitas program pemberdayaan masyarakat.

Outcome (Dampak Jangka Pendek), pengukuran *outcome* dilakukan maksimal setelah 3 (tiga tahun) program diluncurkan, untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, antara lain meliputi: (1) keterserapan lulusan di dunia industri; (2) kemandirian lulusan sesuai dengan kompetensi keahliannya; (3) meningkatnya kompetensi SDM desa dalam pengelolaan sumber daya desa; dan (4) meningkatnya produktivitas dan pemasaran produk desa.

Impact (Dampak Jangka Panjang), pengukuran *impact* dilakukan minimal 5 (lima tahun) setelah program diluncurkan, untuk mengukur keberhasilan program SMK dalam pembangunan pedesaan. Pengukuran tersebut meliputi: (1) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap SMK; (2) meningkatnya karir dan kesejahteraan lulusan SMK; (3) terwujudnya sekolah mandiri; (4) meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa; (5) berkurangnya angka pengangguran di pedesaan; (6) masyarakat desa menjadi mandiri dan sejahtera.

BAB VI PENUTUP

Program SMK Membangun Desa merupakan upaya nyata dalam merealisasikan peran SMK dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan di pedesaan, dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Pedoman pelaksanaan ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat SMK, guna memberikan acuan kepada SMK dan pihak terkait lain dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi SMK Membangun Desa, sehingga tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai dengan cepat dan baik.

Apabila segenap permasalahan sosial ekonomi di pedesaan teratasi, niscaya sebagian besar tantangan pembangunan di negeri ini dapat dilewati. Di sinilah pentingnya menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan. Jika keadaan desa tercukupi, baik dalam aspek sosial dan ekonomi, maka bisa ditarik kesimpulan kota juga akan mendapatkan dampaknya. Sebaliknya, jika permasalahan desa belum bisa teratasi, kota juga tidak bisa berharap lebih.

SMK dapat berperan menjadi penggerak pembangunan pedesaan, dengan melakukan inovasi dan edukasi masyarakat desa menjadi masyarakat modern dan berkemajuan. Selain itu, lulusan SMK dapat menjadi angkatan kerja pedesaan yang menguasai kecakapan teknologi baru, keterampilan kreativitas dan inovasi, pemikiran kritis dan pemecahan masalah kompleks, komunikasi, kolaborasi, dan kewirausahaan, sehingga lulusan SMK akan menjadi generasi baru pedesaan yang memancarkan sinar terang untuk pembangunan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

PEDOMAN SMK MEMBANGUN DESA

Penanggung Jawab

Dr. Ir. M Bakrun, M.M.

Pengarah

Arfah Laidiah Razik, SH, M.A.

Dr. Abdul Haris, M.Si.

Tim Penulis

1. **Bangkit Ari Murti ST, MAP.**
2. **Drs. Sutrianto, M.Pdk.**
3. **Juli Kurniyati, SE.**
4. **Dr. Toto Sugiarto Arifin, M.Hum.**
5. **Prof. Ir. Ambar Pertiwiningrum, M.Si., Ph.D. Asean. Eng.**
6. **Dr. Marlock**
7. **Turijin GradDip AIS, MBus, Ph.D.**
8. **Dr. Drs. Ketut Ima I, M.Pd., M. Kes.**

Desain

Nurul Fatimah, S.Pi., M.Si.

Ezza Mentariningrum, S.I.Kom.

Nida Fauziah, S.I.Kom